

Dinamika Pergolakan Politik di Mesir Abad 20-21 (Sejak Raja Faruq Hingga Muhammad Mursi)

Johan Septian Putra
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
20201021011@student.uin-suka.ac.id

Abstract

Egypt since the classical era of Islam to the contemporary era, there have been upheavals that seem endless, especially in the modern era. The political upheaval seems to have become a "culture" that cannot be separated from the Egyptian political community. The purpose of this study is to describe the political dynamics in Egypt in the classical to medieval era and to explain the development of Egyptian politics in the Modern era since the arrival of Europeans to President Morsi in the 21st century. The results of this study are the upheaval of Egypt's political dynamics can not be separated from the role of the military in the flow of democracy and structural government which always experiences gaps and tends not to get finalized, then the transition to changes in Egypt's political form drastically occurred with the revolution of the 20th century by overthrowing the monarchy system. republican system although the democratic side could not be implemented properly since the Nasser era until the Morsi government and ended in 2013.

Key Word: *Political Dynamics, Political Upheaval, Egyptian Revolution and Military Coup.*

Abstrak

Mesir semenjak era klasik Islam hingga era kontemporer telah terjadi pergolakan yang seolah-olah tidak ada habisnya, terutama di era modern. Pergolakan politik tersebut seperti sudah menjadi "budaya" yang tidak terlepas dari masyarakat perpolitikan Mesir. Adapun Tujuan mengkajian materi ini adalah untuk mendeskripsikan dinamika politik di Mesir di era klasik hingga pertengahan dan menjelaskan perkembangan politik Mesir di era Modern sejak kedatangan bangsa Eropa hingga Presiden Mursi di abad ke-21. Hasil penelitian kajian ini adalah pergolakan dinamika politik Mesir tidak terlepas dari peran militer dalam arus demokrasi dan struktural pemerintahan yang selalu mengalami kesenjangan dan cenderung tidak mendapatkan finalisasi kemudian transisi perubahan bentuk politik Mesir secara hebat terjadi dengan adanya revolusi abad ke-20 dengan meruntuhkan sistem monarki kepada sistem republik walaupun sisi demokrasi tidak dapat terlaksanakan dengan baik sejak era Nasser hingga pemerintahan Mursi dan berakhir tahun 2013.

Kata Kunci: Dinamika Politik, Pergolakan Politik, Revolusi Mesir dan Kudeta Militer.

Pendahuluan/Introduction

Mesir memiliki sejarah panjang dalam mengikuti perkembangan peradaban di dunia semenjak era Kerajaan Mesir kuno hingga Republik Mesir kontemporer. Perkembangan politik yang terjadi tidak terlepas dari beberapa faktor dari masing-masing aktor politik dan

kelompoknya dalam membangun peradaban Mesir agar menjadi lebih baik. Demikian pula semenjak kehadiran Islam di Mesir, setidaknya memberikan titik balik peradaban yang lebih baik dari sebelumnya, terutama dari sisi politik. Kehadiran Islam telah memberikan kontribusi aktif terhadap kemajuan

peradaban Mesir (era Fatimiyah hingga Mamluk), kemudian peradaban pertengahan Islam menjadi bagian di peradaban Mesir hingga kehadiran Napoleon Bonaparte dari Perancis di abad ke-19 memberikan langkah modernisasi dini bagi Mesir dengan peran serta dari Muhammad Ali Pasya. Kemajuan dari masing-masing aktor politik di era tersebut tidak terlepas dari perebutan kedaulatan atas nama kelompok masing-masing sehingga itu berdampak pada abad modern hingga saat ini.

Era modern abad ke-20 saja, Mesir terjadi pergolakan politik berupa revolusi yang dinamakan Revolusi Mesir. Revolusi Mesir pada 23 Juli 1952 yang ditujukan untuk melengserkan Raja Faruq. Revolusi ini mempunyai ambisi politik dan beberapa tujuan lain yakni untuk mengakhiri imperialisme, feodalisme, monopoli (kendali kapitalistik), membentuk tentara yang kuat, menetapkan keadilan sosial dan menegakkan demokrasi di Mesir. Kemudian pasca revolusi itu terjadi, bentuk negara Mesir berubah bentuk menjadi Republik yang sebelumnya berbentuk Monarki dengan Muhammad Najib menjabat sebagai presiden dan Gamal Abdul Nasser menjabat sebagai perdana menteri. Saat itu juga peran militer Mesir terpusat dalam dwi-tunggal antara Najib dan Nasser yang mana keduanya telah terjadi persaingan kekuasaan dalam pemerintahan Negara Mesir hingga pada akhirnya Najib mengundurkan diri (November 1954) dan Nasser diangkat menjadi kepala pemerintahan Mesir. (Svahida, 2017, pp. 21-23)

Nasser meninggal pada tahun 1970 mewariskan sebuah rezim yang telah membuat beberapa kemajuan struktural politik dan ekonomi. Nasser memerintah hampir 16 tahun yang kemudian digantikan oleh Anwar Sadat yang saat itu

sebagai wakil presiden Mesir. Ketika Anwar Sadat memimpin pemerintahan sejak 28 September 1970-Oktober 1981; Sadat melakukan amandemen konstitusi untuk memberinya kekuasaan lebih panjang sekaligus menghilangkan ideologi Nasser (sosialis) diganti menjadi ideologi kapitalis versi Sadat berupa kebijakan ekonomi terbuka yang resmi diluncurkan tahun 1974. Sadat memimpin pemerintahan Mesir hanya sebentar, karena Anwar Sadat terbunuh pada tahun 1981 saat parade militer memperingati Perang Arab-Israel (1973); Sadat ditembak oleh Khalid Istanbul (anggota Jama'ah Islamiyah). Saat itu Husni Mubarak menjadi wakil presiden tanpa melalui proses pemilu menggantikan Sadat menjadi Presiden diresmikan jadi Presiden Mesir pada 14 Oktober 1981. (Svahida, 2017, pp. 25-28)

Revolusi Mesir terulang pada 2011 dengan dituntutnya Husni Mubarak untuk melepaskan jabatan presidennya. Revolusi tahun 2011 ini merupakan revolusi terbesar sepanjang sejarah negara Mesir yang lebih dikenal dengan nama "Revolusi 25 Januari" (tahun 2011). (Amri, 2015, pp. 51-52) Setelah itu penurunan Husni Mubarak dari kursi kepala negara dan pemerintahan pusat, kemudian terpilih presiden baru Mesir bernama Muhammad Mursi yang tetap saja tidak mampu membuat stabilitas politik Mesir aman hingga kemudian Muhammad Mursi kembali jatuh akibat kudeta militer pada tahun 2013; atas dukungan militer kelompok sekuler dapat mengalahkan kelompok Islam dan menguasai pemerintahan. (Ghafur, 2016, p. 94)

Dari beberapa redaksi di atas setidaknya memberikan hipotesis sederhana bahwa Mesir semenjak era klasik Islam hingga era kontemporer telah terjadi pergolakan yang tidak ada habisnya, terutama di era modern, pergolakan politik tersebut seolah-olah sudah menjadi "budaya" yang tidak

terlepas dari masyarakat Mesir. Oleh karena itu, menjadi yang hal menarik untuk dikaji lebih dalam tentang dinamika politik di Mesir dalam artikel ini yang mana ada dua problematika akademik pembahasan, yaitu: *bagaimana Mesir Islam di era klasik hingga pertengahan dan bagaimana perkembangan politik Mesir di era Modern.*

Artikel ini disusun berdasarkan metodologi penelitian tertentu. Jenis riset yang digunakan yaitu penelitian kepustakaan (library research) dengan mengumpulkan data melalui penelusuran literatur-literatur yang terkait dengan dinamika pergolakan politik di Mesir abad ke-20-21 berupa buku, artikel, hasil riset maupun tulisan terkait lainnya. (Wibowo, 2021, p. 53)

Pendekatan yang digunakan harus sesuai topik yaitu menggunakan pendekatan historis. Pendekatan historis ialah sebuah pendekatan yang dapat dipergunakan dalam melakukan riset mengenai objek kesejarahan, agar dapat mengungkapkan berbagai dimensi dari peristiwa yang dianggap penting dalam rentang waktu tertentu. Metode riset yang digunakan berupa metode deskriptif-analitis. Metode ini dipakai untuk menggambarkan dinamika pergolakan politik dalam negeri Mesir pada masa modern, serta melakukan analisis terhadap pelaksanaan demokrasi di Mesir abad ke-20 hingga ke-21. (Wibowo, 2021, pp. 53-54)

Penggunaan metode deskriptif-analitis diharapkan dapat mengungkap secara gamblang mengenai topik riset berupa dinamika pergolakan politik Mesir era modern dengan menemukan data yang valid bagi penyusunan kerangka berpikir dalam mengungkapkan data dibalik fenomena dan peristiwa yang dianggap penting. Penting tidaknya suatu data yang diperoleh dalam proses riset sangat bergantung kepada relevansi dengan objek penelitian dan signifikansinya serta permasalahan yang sedang diteliti supaya

mendapatkan data yang valid. (Wibowo, 2021, p. 54)

Pembahasan (Discussion)

A. Dinasti Islam di Mesir (Era Klasik Hingga Pertengahan)

Periode klasik Islam pada masa Dinasti Umayyah dan Abbasiyah, wilayah Mesir ialah sebuah provinsi yang kurang penting. Namun, sejak masa pertengahan abad ke-9 M, Mesir memperlihatkan pertanda awal untuk sebuah distrik independen. Saat itu ada Dinasti Thulunyah pernah menguasai Mesir (868-905 M), Dinasti Ikhsidiyah (935-969 M) dan Dinasti Fatimiyah mendirikan khilafah sendiri di Mesir (969-1171 M). (Lapidus, 1999, p. 532) Dinasti Thulunyah merupakan pemberi kemakmuran dan kemewahan Mesir dari masa Ahmad Thulun hingga Syaiban bin Ahmad Thulun (254-292H/ 868-905 M). Awalnya Ahmad Thulun dikirim oleh pemerintah Abbasiyah ke Mesir untuk menjadi gubernur, namun dia telah membebaskan diri dari kungkungan pusat pemerintahan Abbasiyah di Baghdad dengan mendeklarasikan Dinasti Thulunyah di Mesir. (Ahmad, 1974, pp. 312-313) Dinasti Thulunyah kemudian takluk ditangan keluarga Ikhsidiyah pada 905 hingga berkuasa di Mesir pada tahun 969 M yang kemudian ditaklukkan oleh Jauhar al-Siqily (Panglima dari Dinasti Fatimiyah)

Dinasti Fatimiyah berhasil merebut Mesir dari tangan keluarga Ikhsidiyah pada tahun 969 M. Penaklukan ini membawa keuntungan lain karena armada Dinasti Fatimiyah bertambah kuat lagi dengan unit-unit baru di Maqs yang mengganti Bulaq sebagai pelabuhan Kairo. Pahlawan penakluk Mesir ialah Jauhar al-Siqily berasal dari Sicilia. Setelah Jauhar al-Siqily menaklukan Fusthat (ibu kota Mesir pada waktu itu) pada 969 M, Jauhar mulai membangun kota baru bernama al-Qahirah (Kairo). Kota ini kemudian

menjadi pusat pemerintahan Dinasti Fatimiyah pada tahun 973. Untuk membangun peradaban bidang keagamaan dan ilmu pengetahuan di al-Qahirah, Jauhar al-Siqily mendirikan sebuah mesjid bernama al-Azhar pada tahun 972 M yang kemudian dijadikan sebuah lembaga pendidikan akademis oleh Khalifah Al-Aziz (975-996 M). (Susmihara & Rahmat, 2013, p. 222)

Periode konsolidasi keagamaan dan politik Dinasti Fatimiyah terjadi tahun 969-1021 M. Periode kedua antara tahun 1021-1073 merupakan era kemunduran tatanan politik dinasti ini, yakni adanya terjadi peperangan antar faksi-faksi militer dan pembagian wilayah dinasti menjadi sejumlah *iqta'* yang dikuasai oleh para pejabat militer yang mempunyai kedudukan tinggi serta berpengaruh dalam pemerintahan. Kemunduran ini dihentikan oleh pemerintahan Badr Al-Jamali dan putranya, al-Afdhal dari tahun 1073-1121 M yang mana kepala militer menggantikan para khalifah sebagai pimpinan pemerintahan yang efektif. (Lapidus, 1999, p. 538)

Ketika Dinasti Fatimiyah dalam kemerosotan yang bersifat total, Nur al-Din Zanki mengirimkan seorang jenderal bernama Syirkuh atau Shalahuddin al-Ayyubi dengan pasukan bersenjata untuk merebut kekuasaan Mesir dari Dinasti Fatimiyah pada tahun 1169. Pada 1171 M, mereka memecat khalifah Fatimiyah yang terakhir dan mendirikan sebuah rezim baru bernama Dinasti Ayyubiyah beraliran sunni. Ketika Shalahuddin al-Ayyubi berhasil menaklukkan Mesir pada 1171, keberhasilan tersebut telah membuka jalan bagi pembentukan mazhab hukum Sunni di wilayah Mesir. (Lapidus, 1999, pp. 544-545)

Dinasti Ayyubiyah diruntuhkan oleh sebuah pemberontakan salah satu resimen mamluk atau budak mereka dengan melakukan pembunuhan sultan terakhir

Dinasti Ayyubiyah pada 1250 M. Setelah itu, Resimen Mamluk mengangkat salah seorang pejabatnya bernama Aybeg menjadi sultan baru dan berdiri Dinasti Mamluk di Mesir. Untuk menopang kelompok elit militernya, Mamluk menggabungkan dari kalangan birokrasi Mesir dan *iqta'*. Pendapatan dinasti dari bidang perpajakan Mesir dan Suriah dijadikan untuk gaji sultan beserta para pejabat militer. (Lapidus, 1999, pp. 547-549)

Kekuasaan Dinasti Mamluk juga tidak berlangsung lama di Mesir. Karena Dinasti Mamluk mampu ditaklukkan oleh Dinasti Utsmaniyah pada tahun 1517 M. Dinasti Utsmaniyah menyusun barisan pertahanan di Mesir dengan sejumlah pasukan Jennisari, membentuk kembali sistem pemerintahan otonom serta mengangkat beberapa gubernur militer, inspektur, pejabat finansial untuk mengamankan pengumpulan pajak dan penyeteroran surplus pendapatan dari wilayah Mesir ke Istanbul. Dinasti Utsmaniyah mampu menentramkan Mesir, kesejahteraan pertanian, sistem irigasi dan perdagangan yang baik, menguasai kaum Badui, sehingga mengamankan arus perputaran pendapatan pajak. (Lapidus, 1999, p. 553)

Hubungan Dinasti Utsmaniyah dengan resimen Mamluk serta keterlibatan ulama dan sufi telah berlangsung dari abad ke-17 dan abad ke-18 M. Sebagaimana di beberapa wilayah Dinasti Utsmaniyah lainnya, otoritas kekuasaan para gubernur merosot dan para resimen Mamluk menguasai dana belanja militer, mengambil hak tanah pajak dan secara bertahap berubah menjadi hak milik sepanjang masa jabatan mereka, dan menguasai tanah wakaf. Ketika tengah berkuasa, keluarga Mamluk telah terpecah menjadi sejumlah faksi. (Lapidus, 1999, p. 556)

Keluarga Qasimiyah dengan Faqariyah saling berperang untuk memperebutkan kekuasaan politik di

Mesir. Sementara kelompok yang kuat menguasai Kairo, maka kelompok yang terkalahkan menarik diri ke wilayah dataran tinggi Mesir. Pertempuran antar faksi ini berlangsung hingga akhir abad ke-18 dalam bentuk despotisme (kelalaian) Ali Bey. Faksionalisme Mamluk ini juga melibatkan peran para pemuka agama. Sebagai pihak penengah, mereka menjadi pihak yang paling penting dan pihak paling kaya. Pada akhir abad ke-18 ulama mencapai puncak pengaruh politik mereka. Sekalipun demikian, pada 1786-1787 Dinasti Utsmaniyah berhasil mengalahkan faksi-faksi Mamluk tersebut dan memulihkan kembali kekuasaan pemerintahan pusat. (Lapidus, 1999, p. 556)

Dengan demikian, masyarakat Mesir pada bagian lembah subur (*frestile crescent*) diperintah oleh kalangan elite Utsmaniyah dengan bekerja sama bersama beberapa pihak lokal. Pihak lokal tersebut adalah keluarga Mamluk dan para ulama. Daerah lembah subur (*frestile crescent*) dikuasai oleh kalangan pasukan Jennisari, para pejabat, ulama lokal dan kepala suku Badui. Pada akhir abad ke-18, Mesir telah terjadi perimbangan kekuatan antara pemerintahan pusat dan propinsial, bahkan antara ibu kota propinsi dengan daerah pedalaman, bergeser pada kekuatan pihak kedua. Hampir setiap lembaga politik lokal -keluarga Mamluk, Pasukan Jennisari, ulama, pejabat, petani pajak, serikat pekerja, warga perkotaan, suku-suku Badui dan komunitas pegunungan- berusaha untuk meningkatkan otonominya..(Lapidus, 1999, p. 561)

B. Dinamika Perkembangan Politik

Mesir Era Modern

1. Dari Penaklukan Napoleon Bonaparte hingga Raja Faruq

Periode modern Mesir mulai terjadi sejak penaklukan Napoleon Bonaparte atas Mesir (1798-1801). Kedatangan

Bonaparte telah merusak tatanan politik klasik selama 300 tahun dan menjadikan Mesir masuk ke dalam sistem politik global dari Eropa yang saat itu memasuki tahap-tahap kemunduran kekuasaan Dinasti Utsmaniyah di Mesir. Penyebab kemunduran tersebut adalah karena Dinasti Utsmaniyah fokus mempertahankan wilayah kedaulatannya di bagian Eropa Timur. Akibat itu pula, despotisme lokal muncul di jazirah Arab Utsmaniyah terutama Mesir serta perekonomian yang merosot ke tingkat bertahan hidup. Masa kekacauan setelah serangan Napoleon Bonaparte tersebut, ulama berperan penting dalam berkuasanya Muhammad Ali Pasya (1804-1841 M) menjadi Gubernur Mesir dan tetap dalam teritorial Dinasti Utsmaniyah. (Fuad, 2016, p. 199)

Muhammad Ali Pasya juga berperan penting atas pengusiran Napoleon Bonaparte dari Mesir. Sultan Utsmaniyah menjadikannya sebagai Pasya Mesir pada 1805, dan Ali Pasya menjadikan dirinya sebagai penguasa baru lembah sungai Nil. Sebenarnya sejarah Mesir pada paruh pertama abad ke-19 merupakan sejarah tentang Ali Pasya ini yang telah berjasa mendirikan "semi-dinasti"-nya hingga berkuasa tahun 1952. Dia mengambil alih semua kekuasaan daerah sekitar Mesir, kemudian memercayakannya kepada para pejabat terdekatnya. Dengan demikian, masa itu merupakan masa Muhammad Ali Pasya menjadi pemilik tunggal negari ini; ia melakukan monopoli dagang dalam negeri dan dia juga termasuk penggerak pertama nasionalisasi di bagian Jazirah Arab. (Hitti, 2008, p. 925)

Muhammad Ali Pasya mampu membangkitkan kekuatan militer negerinya dengan mengundang berbagai misi militer maupun tenaga pendidik dari Eropa untuk melatih penduduk Mesir. Berdasarkan catatan sejarah antara tahun 1813 hingga 1849 M, ada 311 pelajar dari Mesir dikirim ke Italia, Perancis, Inggris dan Austria dari biaya pemerintah

(mencapai 273.360 Euro) dan didirikan juga rumah untuk kepentingan para pelajar tersebut, khusus yang berada di Paris. Para pelajar Mesir mempelajari subjek pelajaran tentang militer dan angkatan laut, teknik mesin, kedokteran, farmasi, kesenian, dan kerajinan. (Hitti, 2008, p. 926) Namun kebangkitan politik militer Mesir tersebut mulai pudar ketika Inggris melakukan intimidasi terhadap Mesir dengan puncaknya berupa peperangan angkatan laut yang dramatis di Iskandariyah dan Muhammad Ali Pasya akhirnya mengaku kalah dengan menandatangani Perjanjian London tahun 1840. (Fuad, 2016, p. 200)

Muhammad Ali Pasya digantikan oleh Said Pasya yang memiliki gaya pemimpin non-otoritarianisme di Mesir. Said Pasya mewajibkan militer bagi seluruh kalangan di Mesir dan ia memberikan hak-hak istimewa terlalu besar bagi warga asing. Masa pemerintahan Said Pasya, Mesir juga menggelontorkan dana sebesar 17 Juta Poundsterling untuk membiayai pembukaan Terusan Suez dengan sumber daya pekerjaannya dari penduduk Mesir. Namun, keuntungan yang didapat Mesir dari proyek ini tak lebih dari 15 persen, sementara 85 persen diambil oleh pihak Eropa, bahkan diberi hak istimewa hingga 99 tahun. (Ibrahim & Saleh, 2014, pp. 997-998)

Pemerintahan Mesir berlanjut kepada Taufiq Pasya (1879-1892 M), dia mengkhawatirkan kekuasaannya yang melemah hingga meminta bantuan ke Inggris untuk melindungi pusat kekuasaannya. Gerakan perlawanan rakyat Mesir terjadi di bawah pimpinan Ahmad Orabi dan mampu dikalahkan oleh pasukan Mesir. Revolusi Mahdiah di Sudan juga menjadi bagian penting masa pemerintahan Taufiq Pasya, hingga akhirnya bisa ditaklukkan oleh pasukan Inggris dan Mesir yang memiliki

kolaborasi pemerintahan bersama Inggris. (Ibrahim & Saleh, 2014, p. 1000)

Titik perubahan drastis sejarah politik Mesir khususnya gerakan massa menuntut adanya perubahan melalui revolusi dimulai pasca Perang Dunia I. Saad Zaghlul muncul sebagai pemimpin di Mesir yang berusaha dan berjuang untuk menuntut kemerdekaan Mesir dari Inggris yang berujung tertangkapnya Saad Zaghlul dan kelompoknya serta mengasingkannya ke Malta pada 8 Maret 1919. Penangkapan dan pengasingan ini mampu membangkitkan kemarahan rakyat Mesir sehingga pada 9 Maret 1919 terjadilah revolusi besar menentang Inggris di Kairo. Kejadian ini merupakan revolusi modern pertama kali yang terjadi di Mesir yang lebih dikenal dengan Revolusi Mesir 1919. (Amri, 2015, pp. 49-50)

Ketika Perang Dunia I terjadi, Sultan Mesir yakni Husain Kamil (1914-1917 M) saat itu bersekutu kepada Utsmaniyah, hingga akhirnya ia dipecat Inggris dari jabatannya sekaligus mendeklarasikan Mesir dalam protektoratnya. Hal ini tidak terlepas dari peran Ahmad Fuad naik tahta setelah kematian saudaranya bernama Husain Kamil. Ahmad Fuad (1917-1922 M) mengambil sikap netral dalam perseteruan Inggris dan rakyat Mesir. Tetapi Ahmad Fuad memihak Inggris hingga Mesir-Inggris mengadakan perjanjian 1936 yang berisi perubahan beberapa poin pada Deklarasi 28 September, di antaranya status Mesir berubah dari wilayah jajahan Inggris, kekuatan militer Inggris dibiarkan tetap berkuasa di kawasan Terusan Suez dan Inggris juga menghapuskan hak-hak istimewa negara-negara lain di negeri Mesir. (Ibrahim & Saleh, 2014, pp. 1001-1003)

Pasca Raja Ahmad Fuad mangkat, ia digantikan oleh Raja Faruq, yang memerintah Mesir dari tahun 1936 hingga 1952, Raja Faruq dikenal sebagai pemimpin non-kompeten dan korup. Ketika kudeta

para perwira Mesir dilakukan, sekitar 0,4 persen warga Mesir memiliki 35 persen tanah subur. Hanya sebagian kecil warga Mesir bisa menikmati kekayaan alam tersebut dan sebagian besar tidak bisa menikmati hasil perekonomian tersebut. Korupsi Raja Faruq tersebut berimbas kepada anggaran militer Mesir serta berdampak pula atas keterlibatan Mesir terhadap Perang Arab-Israel (1948-1949). Alasannya karena Mesir saat itu memiliki anggaran yang minim untuk keperluan latihan militer serta pembelian persenjataan perang sehingga membuat pasukan Mesir mengalami kekalahan di medan pertempuran melawan Israel. Di tambah lagi dengan masih berkuasanya Inggris di Mesir secara politis dan menguasai Terusan Suez. Hal ini semakin memicu kebencian masyarakat Mesir terhadap Raja Faruq, terutama dari kalangan militer. (Widyarsa, 2014, p. 274)

2. Pergolakan Politik dari Revolusi 1952 hingga 2011

Dinamika pergolakan kehidupan politik Mesir kembali terjadi dengan ketidak-stabilan politik masa Raja Faruq akibat merajalelanya praktek korupsi dan sikap hedonisme para pejabat negara. Kekuasaan raja sangat besar termasuk pengangkatan pejabat, kontrak pemerintah, kebijakan penjualan tanah negara dan lainnya. Selain itu, penjajahan Inggris yang lama serta intervensi asing ditambah lagi sistem kerajaan menindas rakyat dan tiadanya demokrasi hingga mengakibatkan kemerosotan ekonomi serta kerusakan sosial kemasyarakatan. Keadaan buruk tersebut memaksa rakyat Mesir melakukan revolusi dengan sebutan "Revolusi Mesir 1952". Revolusi ini ditunggangi sebagian perwira dalam kelompok *Dubbath Al-Ahrar (Free Officers)* pimpinan Gamal Abdul Nasser. Pada Juli 1952, *Dubbath Al-Ahrar* bergerak menguasai pusat-pusat pemerintahan dan sarana-sarana vital lainnya, serta

mengepung Istana Abdin kemudian mereka mengumumkan pengambil alihan kekuasaan pemerintahan Mesir di radio. (Amri, 2015, p. 50)

Revolusi 1952 tersebut telah berhasil menghilangkan pengaruh Inggris, mendirikan angkatan bersenjata yang kuat dan menghilangkan pengaruh politik dari para pemodal asing. Kemudian untuk membentuk pemerintahan transisi para perwira tersebut membentuk *Revolutionary Command Council (RCC)* yang dipimpin oleh Jendral Muhammad Naguib. RCC secara cepat bergerak membersihkan aparatus pemerintahan Raja Faruq dan menggantikannya dengan para pejabat baru yang mayoritas berasal militer. Pada tahun 1953 RCC membubarkan parlemen dan konstitusi 1923, serta mendeklarasikan Mesir sebagai republik yang secara otomatis menghapuskan monarki. Bahkan tahun 1954, RCC melarang semua pejabat diangkat kembali dari tahun 1946 sampai 1952. (Widyarsa, 2014, p. 275)

Pemerintahan Republik Mesir pertama kali dipimpin oleh Gamal Abdul Nasser dan Presiden dipimpin oleh Muhammad Najib sebagai kepala negara yang keduanya sama-sama memiliki kepentingan di Mesir. Ketika menghadapi permasalahan terkait dengan Ikhwanul Muslimin (kelompok Islam Reformis) yang keduanya juga memiliki pandangan yang berbeda. Muhammad Najib menilai bahwa peristiwa 28 Maret 1954 merupakan kudeta kedua, setelah kudeta 23 Juli 1952. Muhammad Najib tidak bisa mengendalikan keadaan, sehingga Gamal Abdul Nasser tampil ke depan mengepalai sebuah pemerintahan militer untuk meredakan konflik. (Trisnawati, 2016, p. 55)

Konflik antara Muhammad Naguib dan Gamal Abdul Nasser sebenarnya sudah dimulai sejak proses peralihan pemerintahan monarki ke republik. Pada saat itu, Muhammad Najib sebagai presiden terpilih ingin langsung mengadakan pemilu legislatif dan mengembalikan pemerintahan negara ke

pihak sipil. Gamal Abdul Nasser berpendapat lain yakni memulihkan sosial dan ekonomi, setelah itu dilaksanakan pemilu. Akibatnya Gamal Abdul Nasser tidak enggan untuk menegur atau menekan Muhammad Najib. Sejak terbentuknya republik, pemilu dilaksanakan pada bulan Juni 1956 dengan terpilihnya Gamal Abdul Nasser sebagai presiden baru setelah Najib. (Trisnawati, 2016, p. 55)

Pemerintahan Gamal Abdel Nasser menerapkan sistem politik sosialis kemudian setelah kematiannya digantikan oleh Anwar Sadat. Pemerintahan Anwar Sadat menjadikan kekuatan Islam di Mesir dengan melakukan liberalisasi politik dan ekonomi telah mendorong munculnya berbagai gerakan dan organisasi keagamaan. Islamisasi di Mesir pada bidang sosial-politik dan lingkungan aparatur negara. Hal itu dapat dilihat dari sikap pemerintah yang lebih menekankan hukum, bahasa dan simbol keagamaan sebagai cara untuk melegitimasi kewenangannya dalam negara. Pada tahun 1980, Anwar Sadat menetapkan hukum Islam sebagai sumber konstitusi Mesir. (Ghafur, 2016, pp. 93-94)

Walaupun ada unsur Islam dalam pemerintahan Sadat, pemerintahannya tetap didominasi oleh militer yang sekuler kemudian digantikan oleh Husni Mubarak setelah Anwar Sadat tewas terbunuh tahun 1981. Semenjak tahun 1981 Negara Mesir dipimpin oleh Husni Mubarak (mantan komandan Angkatan Udara dan wakil presiden Mesir saat itu). Husni Mubarak dikenal sebagai seorang pemimpin otoriter yang keras terhadap lawan politiknya. Banyak para aktivis dari gerakan Islam dan kelompok oposisi yang ditahan dan dibunuh di bawah pemerintahannya. (Ghafur, 2016, pp. 89-90)

Kepemimpinan Mubarak juga tidak memperlihatkan adanya demokratisasi, justru menyebabkan Mubarak menjadi semakin otoriter dalam negaranya. Gaya

pemerintahan Mubarak mencerminkan respon terhadap kegagalan kebijakan sosialis Nasser atau kebijakan liberalis Sadat. Model pemerintahan dari dua pendahulunya dianggap gagal dan mengakibatkan stagnasi politik, sosial-ekonomi dan kegagalan kebijakan luar negeri Mesir. Sebagaimana seperti otokrat lainnya, Mubarak semakin delusif dengan memperkuat sistem pemerintahan otoriter dan melakukan kontrol politis terhadap partai, bagian birokrasi pemerintahan dan militer di Mesir. (Ulfa, 2017, p. 44)

Salah satu dari sisi kontrol politis Mubarak adalah dengan melakukan amandemen terhadap Konstitusi 1971 pasca terbunuhnya Anwar Sadat pada tahun 1981. Mubarak memerintahkan atas legitimasi UU. No. 162, Mubarak juga memperluas kekuasaan Kementrian Dalam Negeri dan intelijen yang secara rutin terlibat dalam penyiksaan dan pelanggaran HAM atas pendalihan untuk menegakkan aturan. Organisasi Hak Asasi Mesir melaporkan rentetan tahun 1993-2008 telah terjadi 460 kasus penyiksaan dengan 167 kasus kematian akibat penyiksaan tersebut. (Ulfa, 2017, p. 44)

Mubarak melakukan monopoli politis dalam pemilu dengan merancang Mubarak sebagai satu-satunya calon presiden dan panggung politik didominasi oleh Partai Nasional Demokrat (NDP). Hal ini bisa dilihat pada Pemilu 1999 yang mana Mubarak mendapat 94% suara mutlak dan pada pemilu 2005 mendapat 88% suara mutlak. Partai sekularis nasional yakni partai Wafd yang menjadi kekuatan politik liberal paling populer di Mesir mengalami penurunan popularitas. Pada Pemilu tahun 2005, Ikhwan al-Muslimin, sebagai salah satu gerakan politik Islam terbesar di Mesir sebenarnya memenangkan 88 kursi parlemen dari 518 kursi. Akan tetapi, Mubarak telah melakukan intimidasi dan memanipulasi kekalahan Ikhwanu al-Muslimin (Ulfa, 2017, p. 46)

Kekuasaan politik Mubarak di Mesir mulai goyah semenjak gejolak politik yang terjadi di Tunisia hingga masuk dan mempengaruhi gejolak politik Mesir saat itu. Aksi massa terjadi pada tanggal 25 Januari 2011, rakyat Mesir berkumpul di *Tahrir Square*, di Kairo. Mereka menuntut pengunduran diri Presiden Husni Mubarak. Aksi protes massal tersebut berhasil mengakhiri 30 tahun pemerintahan otoriter Mubarak pada 11 Februari 2011. Meskipun banyak penduduk sipil menjadi korban selama demonstrasi berlangsung, transisi politik Mesir berubah lebih cepat. Keberhasilan demonstrasi Mesir dalam 18 hari terhitung cepat. (Juned et al., 2013, p. 75)

Tepat pada tanggal 10 Februari 2011, Mubarak menyerahkan semua kekuasaan presiden kepada Wakil Presidennya bernama Omar Suleiman, tetapi segera setelah itu mengumumkan bahwa ia akan tetap sebagai Presiden sampai akhir masa jabatannya. Akibatnya protes massal tetap berlanjut dan Suleiman cepat mengumumkan bahwa Mubarak memilih mengundurkan diri dari kursi kepresidenan dan mengalihkan kekuasaan kepada Militer Mesir. Setelah itu, pihak militer segera membubarkan parlemen Mesir, menunda Konstitusi Mesir dan berjanji untuk mencabut "hukum darurat" yang telah berusia tiga puluh tahun. Saat peristiwa ini pula, Essam Syaraf (tokoh sipil) diangkat sebagai Perdana Menteri Mesir (4 Maret 2011) sampai persetujuan luas masyarakat Mesir. (Sahrasad, 2020, p. 45)

Pasca Mubarak turun tahta dari kursi kepresidenan, saat itu pula pemerintahan transisi Mesir berada dalam kendali pemerintahan konstitusi sementara dipegang oleh Dewan Tertinggi Angkatan Bersenjata Militer (*Supreme Council of The Armed Forces/SCAF*). Secara umum proses transisi berjalan non-transparan dan eksklusif. Namun, demikian memang sudah ada beberapa perubahan positif dari sisi politik, yaitu dari: partai politik, calon

presiden; para pemilih harus punya KTP, pembatasan masa jabatan presiden; pembatasan intervensi pemerintah terhadap buruh pekerja; pembatasan intervensi polisi dalam pemilu dan pengawasan terhadap hakim. Tahun 16-17 Juni 2012 adanya pemilu mempertemukan Muhammad Mursi dari Partai Kebebasan dan Keadilan dan Ahmad Syafiq dari Partai Nasional Demokrat. Pemilu dilakukan dalam dua putaran dengan hasilnya, Mursi memperoleh 52,74% dan Syafiq meraih suara sebesar 47,26%. (Sahrasad, 2020, p. 163)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mesir pada 25 Juni 2012 menyebutkan Mursi memperoleh suara sebanyak 51,8 persen sedangkan Syafiq sebesar 48,3 persen. Pemilu Mesir dilakukan pada 16 Juni 2012 yang mengukuhkan dua nama pesaing yakni Muhammad Mursi dan Ahmad Syafiq. Syafiq diasumsikan sebagai representatif kebangkitan rezim Mubarak kembali kalau Mursi sampai kalah dalam kontestasi Pemilu. Sedangkan Mursi dianggap oleh sebagian besar rakyat Mesir sebagai harapan baru demokrasi di negeri Mesir. Representasi rakyat Mesir melekat pada diri Mursi karena berasal dari sipil dan berbeda dengan Syafiq yang berasal dari kalangan militer negara Mesir. (Zulfikar, 2017, pp. 64-65)

Muhammad Mursi memfokuskan pembagian kekuasaan dalam struktur pemerintahannya dari berbagai kalangan. Dia memberikan kesempatan besar kepada kelompok independen untuk menduduki kursi pemerintahan. Hal ini terbukti dengan ditunjuknya Hisyam Qandil (politisi independen) sebagai Perdana Menteri Mesir yang terbaru saat itu. Sebanyak 14 persen dalam jajaran menteri Muhammad Mursi berasal dari partainya, sedangkan sisanya sebagian besar dari kalangan profesional atau politisi independen lainnya. (Zulfikar, 2017, p. 66)

Secara kronologis ketika Muhammad Mursi terpilih sebagai presiden Mesir melalui jalur demokratis, kemudian ia

mencopot jabatan Jendral Hussein Tantawi. Tindakan itu bermaksud untuk membersihkan pengaruh Mubarak di tingkat pemerintahan. Kemudian Mursi mengangkat Abd al-Fattah al-Sisi sebagai Kepala Angkatan Bersenjata. Nantinya justru al-Sisi meng kudeta Mursi melalui ultimatumnya selama 48 jam untuk mundur. Tepat 3 Juli 2013, Mursi resmi digulingkan oleh militer Mesir. Kudeta itu terjadi karena Mursi tidak bisa memadamkan konflik internal dalam pemerintahannya selama 48 jam. Bersamaan dengan itu militer Mesir meng kudeta pemerintahan Mursi dengan alasan untuk menyelamatkan negara. (Zulfikar, 2017, pp. 84-85) Pergolakan politik tersebut sebagian berasal dari masyarakat Mesir meliputi kelompok Sekuler, Liberal, dan Kristen Koptik atau anti-Islam. Menurut mereka Presiden Mursi dinilai bersikap diskriminatif karena sebagian besar pemerintahan dipegang oleh kelompok Ikhwan al-Muslimin. (Zulfikar, 2017, p. 81)

Puncak gelombang krisis politik Mesir pada 3 Juli 2013 itu telah terjadi bentrokan antara dua kubu. Kubu pertama, adalah kelompok Ikhwan al-Muslim yang merupakan pendukung dalam memotori kemenangan Presiden Mursi dalam pemilu demokratis pertama di Mesir pasca Mubarak. Sedangkan kubu kedua mengambil posisi sebagai anti Mursi yang menuntut agar Presiden Mursi mundur dari jabatannya, karena Mursi dianggap tidak mampu melakukan transformasi terhadap institusi yang bersifat otoriter dan mereformasi sistem ekonomi menjadi sistem adil dan jujur. Mursi juga dianggap tidak mampu menjalin kesepakatan dengan militer dan enggan menanggapi suara keberatan pihak oposisi terhadap rancangan konstitusi baru. (Izaqi, 2016, p. 393)

Dengan demikian, pergulatan antar aktor dan kekuatan politik di Mesir terlihat pasca tumbanganya Presiden Husni

Mubarak dengan munculnya kelompok Islam sebagai pemenang Pemilu 2012. Pada 3 Juli 2013 militer berhasil melakukan kudeta terhadap Presiden Muhammad Mursi, atas dukungan militer kelompok sekuler dapat mengalahkan kelompok Islam dan menguasai pemerintahan. Hal tersebut menunjukkan bahwa tumbanganya rezim Husni Mubarak tidak serta merta mengakhiri kekuatan militer, bahkan semakin kuat setelah Dewan Agung Militer (*Supreme Council of The Armed Forces/SCAF*) berhasil melakukan beberapa kali amandemen pada konstitusi Mesir. Kendati demikian, atas desakan internasional, militer dengan terpaksa memberikan peluang kepada elite politik Mesir untuk bersaing dalam kancah perpolitikan nasional dengan menyelenggarakan beberapa kali Pemilu, antara lain, Pemilu Parlemen yang dilanjutkan dengan Pemilu Presiden. (Ghafur, 2016, pp. 94-95)

C. Sistem Politik dan Demokrasi Mesir (Diferensiasi Era Mubarak dan Mursi)

Mengacu pada pemaknaan konsep non-demokrasi modern dari perkembangan globalisasi ekonomi, informasi, dan kultural yang diharapkan banyak pihak dapat menciptakan sebuah era baru, yang di dalamnya dapat dihasilkan sebuah pencerahan politik, pada kenyataannya berkembang ke arah yang bertentangan arah, yaitu ke arah kegelapan kemanusiaan. Era globalisasi yang di dalamnya tercipta sebuah dunia yang terbuka, transparan, demokratis, pada kenyataannya tidak mampu melenyapkan wajah-wajah buruk rupa kekuasaan di dalamnya; wajah tiran yang haus kekuasaan; wajah fasis yang haus pujaan dan hasrat megalomania; wajah barbar yang haus darah dan kekerasan; wajah kolonial yang haus kekayaan dan teritorial. (Piliang, 2005, p. xxxii)

Heidegger menjelaskan proses kejatuhan manusia secara eksistensial,

yaitu terperangkapnya manusia ke dalam dunia umum atau dunia keseharian yang bersifat common-sense. Konteks politik, kejatuhan ini dapat ditafsirkan sebagai kondisi terperangkapnya aktor-aktor politik dan realitas politik pada umumnya ke dalam perangkap citra atau apa yang dapat disebut sebagai kekaisaran citra. Perangkap citra tidak saja melupakan insan politik terhadap perenungan eksistensial, tetapi citra itu sendiri menipu mereka seakan-akan citra itu sendiri adalah eksistensi. (Piliang, 2005, p. 33)

Ketika politik mengintervensi hukum, prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, dan kebersihan hukum diambil alih oleh prinsip-prinsip kecurangan, kecurangan dan kekotoran politik; ketika paradigma citra (imagologi) menguasai hukum, maka prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, dan kebersihan citra menggantikan prinsip-prinsip kebenaran dan keadilan hukum; ketika politik menjajah ekonomi, prinsip persaingan bebas, sportifitas dan legalitas ekonomi digantikan oleh prinsip-prinsip intrik, teror, dan mafia-mafia politik; ketika ekonomi mengenalkan agama, maka prinsip kebenaran, kejujuran dan kesucian agama diambil oleh prinsip-prinsip ilusi, gemerlap dan profanitas komoditi. (Piliang, 2005, p. 36)

Lawan dari non-demokrasi adalah sistem demokrasi dipandang sebagai sebuah proses, merupakan peralihan atau transisi negara dari bentuk kekuasaan otoriter menjadi demokrasi. Pengalaman berbagai masyarakat yang melakukan demokratisasi di lingkungan otoriterisme menunjukkan bahwa umumnya transisi itu berlangsung dalam suasana mobilisasi dan ketidaksabaran hingga melakukan revolusioner. O'Donnell dan Schmitter memberikan pendapat tentang transisi

politik demokrasi yakni fase perubahan dari fase ke fase lain tidak memiliki kesamaan. Konkritnya, transisi demokrasi berarti fase peralihan rezim politik dari tipe otoriter menuju rezim politik pasca otoriter. (AMRI, 2015, p. 37)

Supaya memahami pola-pola transisi berdasarkan epistemologis pelaksanaan demokratisasi di dunia, Samuel Huntington memiliki konsep empat pola transisi, yaitu: pola transformasi (elit penguasa mengambil prakarsa memimpin upaya demokratisasi); pola *replacement* (kelompok oposisi memimpin perjuangan menuju demokrasi); pola *transplacement* (demokratisasi berlangsung sebagai akibat negosiasi dan *bargaining* antara pemerintah dengan kelompok oposisi); pola intervensi (lembaga-lembaga demokratis dibentuk dan dipaksakan berlakunya oleh aktor dari luar). (AMRI, 2015, p. 38)

Masa transisi sangatlah kritis sebab tak ada jaminan bahwa proses transisi akan selalu menghasilkan rezim demokratis. Pergolakan-pergolakan internal yang disebabkan faktor-faktor ekonomi, budaya dan politik berpeluang menjadi ketidakpuasan massal yang mengancam kohesi sosial masyarakat. Begitu pula, sikap-sikap politik otoriter akan kembali lagi berkuasa bilamana kohesi rezim transisi lemah atau tidak kredibel secara politik sehingga mendorong kekuatan-kekuatan pro-rezim lama yang otoriter bangkit kembali. Suatu rezim politik sipil yang sedang mengalami transisi demokrasi dihadapkan pada dua pilihan. *Pertama*, menjalani transisi demokrasi dengan tingkat konsolidasi elite yang solid ke arah satu tujuan tercapainya demokratisasi politik; *kedua*, menjalani transisi demokrasi yang berliku-liku dengan tingkat kepaduan elite sangat rapuh, penuh konflik dan gejolak politik massa. (AMRI, 2015, p. 39)

Sementara itu, transisi demokrasi merupakan sebuah fase ketika kekuasaan otoriter berakhir dan digantikan oleh rezim demokrasi baru. Ciri yang melekat pada transisi demokrasi adalah hal tersebut merupakan suatu proses yang panjang dan pemerintahan baru yang demokratis bisa saja terbentuk. Akan tetapi, masih terdapat berbagai permasalahan terkait sisa rezim otoriter yang belum berubah sepenuhnya, sehingga dibutuhkan waktu yang lama untuk mencapai konsolidasi demokrasi. Untuk mencapai sistem demokrasi yang relatif mapan atau disebut dengan demokratisasi suatu negara harus melewati beberapa fase. Setidaknya demokratisasi dapat terjadi dalam 3 fase yakni: *pertama*, fase persiapan ketika terjadi polarisasi aktor-aktor politik yang melemahkan rezim otoriter dan kemudian terjadi konflik yang menyebabkan rezim otoriter tersebut jatuh; *kedua*, fase memutuskan yang merupakan fase terjadinya kompromi dan negosiasi antar elite yang kemudian mengarah pada penetapan beberapa aturan-aturan baru yang disepakati; dan *ketiga*, fase pembiasaan (*habituation*) yaitu para aktor politik membiasakan diri dengan aturan demokrasi atau sering juga disebut sebagai fase konsolidasi. (Mushlih & Hurriyah, 2017, p. 44)

Transisi demokrasi dapat dikatakan berhasil ketika: *pertama*, telah terjadi kesepakatan mengenai prosedur-prosedur politik untuk menghasilkan suatu pemerintahan terpilih; *kedua*) pemerintahan tersebut berkuasa atas dasar legitimasi yang sah karena telah dipilih oleh mayoritas melalui pemilihan umum yang bebas; *ketiga*) pemerintahan tersebut secara *de facto* menghasilkan kebijakan-kebijakan baru; dan *keempat*) lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif secara *de jure* tidak harus berbagi kekuasaan dengan badan-badan lain. Keempat syarat tersebut harus terpenuhi sebagai standar berhasilnya sebuah transisi

demokrasi. (Mushlih & Hurriyah, 2017, p. 45)

Konsep di atas terjadi dalam negara Mesir sejak era modern tersebut. Sistem pemerintahan yang dianut oleh Mesir adalah Republik dan Presiden sebagai kepala negara yang berdasarkan Piagam Nasional tahun 1962 yang dicanangkan oleh Presiden Gamal Abdul Nasser dan Konstitusi tahun 1971 yang dibuat juga pada masa Presiden Anwar Sadat, Mesir merupakan sebuah negara sosialis yang disebut dengan Republik Arab Mesir. Piagam Nasional 1962 tersebut menyebutkan bahwa tujuan dari Republik Arab Mesir adalah kemerdekaan, sosialisme dan kesatuan Arab. Sedangkan Konstitusi 1971 menetapkan struktur resmi dalam pemerintahan Mesir, yakni presiden, kabinet, legislatif, dan pengadilan. Dengan kata lain Piagam Nasional 1962 berfungsi sebagai landasan negara, identitas nasional, serta dasar persatuan dan kesatuan bangsa Mesir. Sedangkan konstitusi 1971 merupakan sumber hukum tertinggi serta aturan dan ketentuan yang mengatur jalannya pemerintahan. (Svahida, 2017, p. 19)

Hukum konstitusi Mesir menjelaskan bahwa presiden didukung oleh minimal dua pertiga, anggota legislatif dan harus mendapatkan persetujuan dari mayoritas para pemilih. Presiden memiliki masa bakti yang tidak terbatas, sehingga presiden bebas berkuasa sampai kapanpun. Untuk badan legislatif, Mesir memiliki sebuah lembaga bernama Majelis al-Sya'ab atau Majelis Rakyat yang separuh dari anggotanya haruslah seorang pekerja atau petani. Masa bakti dalam satu periode adalah lima tahun yang terdiri dari 458 anggota, melalui proses pemilu 448 dan 10 lagi dipilih oleh presiden. (Svahida, 2017, p. 20)

Para pemuda, yang memprakarsai protes jalanan sekuler menyadari kesenjangan besar yang ada antara keberhasilan mereka dalam

mengumpulkan massa dan mendirikan partai-partai politik, namun kandas dalam soal jaringan dan basis massa secara nasional untuk mengimbangi Ikhwanul Muslimin yang didirikan pada tahun 1928 oleh Hassan Al-Banna. Ikhwan al-Muslimin telah dan terus membangun dan mempertahankan akar yang mendalam di masyarakat, meskipun dalam jangka waktu lama mengalami tekanan. Para pemimpin Ikhwanul telah memutuskan untuk memperebutkan kurang lebih 50 persen dari kursi parlemen saat pemilihan umum diadakan, Ikhwan al-Muslimin terbukti menang. Maka kini ujian dari sistem demokrasi yang dibangun kaum revolusioner Mesir adalah mendorong sikap tunduk militer kepada otoritas sipil yang terpilih. Para politisi dari semua lapisan menghadapi perjuangan panjang di depan untuk mencapai tujuan tersebut. Para pemuda revolusioner menemukan bahwa menggulingkan para diktator adalah lebih mungkin dan menjadi bagian mudah dari sebuah perjuangan panjang untuk menegakkan demokrasi substansial. (Sahasrad, 2020, pp. 45-46)

Untuk pertama kali, 7 September 2005 Mesir mempunyai *gawe* nasional, yakni menyelenggarakan pemilihan presiden multi-kandidat yang akhirnya dimenangkan oleh Husni Mubarak dari Partai Demokrasi Nasional (NDP). Mubarak menang telak atas lawan-lawannya dengan mengumpulkan 88,6 % suara. Sementara saingan terdekatnya, Ayman Nour dari Partai *al-Ghad* hanya mendapatkan 7,6% suara, dan urutan ketiga ditempati Noaman Gomaa dari Partai *Wafid* dengan mengumpulkan 2,9% suara. Namun pemilu kali ini kurang *legitimate* dan kehilangan kredibilitasnya karena partisipasi rakyat sangat rendah. Dari 31.826.248 yang terdaftar sebagai pemilih, yang berpartisipasi hanya 7.305.063 orang, atau hanya 23% yang mengikuti pemilu presiden. Mubarak hanya memperoleh kurang dari 10% suara dari jumlah total penduduk Mesir 77 juta

jiwa. Ini bisa dikatakan sebagai aksi boikot atas pemilu berhasil. Dalam pemilu kali ini ada ketidakpercayaan rakyat Mesir kepada Mubarak dan rezimnya. Alasan lain mengapa pemilu kali ini kehilangan kredibilitasnya karena muncul tuduhan, pemerintah melakukan kecurangan pemilu dan tidak diizinkan lembaga swasta nasional maupun internasional ikut mengawasi jalannya pemilu. Rezim Mubarak masih jauh dari sistem demokrasi, sebagai contoh Ikhwanul Muslimin yang merupakan kelompok politik yang sangat berpengaruh, tidak bisa membentuk sebuah partai. Dalam sejarah politik di Mesir, memang Ikhwanul Muslimin pernah dinyatakan oleh pemerintah sebagai organisasi terlarang, dan pada saat itu para elit organisasi tersebut banyak yang ditahan, termasuk Hasan al-Banna, bahkan ia dibunuh oleh agen dinas rahasia pemerintah Mesir pada tanggal 12 Februari 1949. (Yani, 2007, pp. 128-129)

Secara tidak langsung permasalahan demokrasi atas nama rakyat yang bebas dan memiliki kedaulatan tidak terjadi dalam negeri Mesir, terlebih pada masa Husni Mubarak dan kemudian digantikan oleh Muhammad Mursi melalui proses pemilu yang langsung dan jujur, tetap saja tidak memberikan kontribusi efektif terhadap keberlangsungan demokratisasi positif dalam negeri Mesir.

Kesimpulan/Conclusion

Periode klasik Mesir mengalami independensi dimulai masa Dinasti Thuluniyah hingga menjadi independensi total era kedaulatan Dinasti Fatimiyah. Independensi itu didapat melalui pergolakan politik yang terjadi terus-menerus tidak berhenti dari abad ke abad hingga masuk pada abad pertengahan sejak Dinasti Ayyubiyah kemudian Dinasti Mamluk hingga Dinasti Utsmaniyah berkuasa di Mesir. Kekuatan politik militer memberikan pengaruh signifikan terhadap

pergolakan politik era klasik hingga abad pertengahan tersebut; kaum militer mempunyai peran penting dalam melakukan dinamika aktifitas politik negara Mesir walaupun notabeneanya bukan dari masyarakat asli, akan tetapi dari masyarakat pendatang Arab, Turki hingga Barbar bahkan Eropa (Sicilia, Italia), secara tidak langsung dapat artikan bahwasanya perputaran kekuasaan politik Islam dilakukan oleh elit militer hingga membangun awal peradaban Islam di negeri Mesir era klasik hingga pertengahan.

Pembentukan era modern di Mesir tidak terlepas kedatangan bangsa Eropa sekaligus melakukan interaksi dengan penduduk dan para pejabat Mesir kemudian memberikan hak otonomi daerah dari Dinasti Utsmaniyah sehingga kewenangan politik mandiri untuk mengurus pemerintahan sendiri di Mesir abad pertengahan hingga awal abad ke-20. Pergolakan politik tidak begitu parah terjadi di masa ini, hanya saja peran dari militer tetap saja ada dalam dinamika politik di Mesir hingga terbentuk semi-dinasti Pasya di Mesir dan berkuasa sampai pertengahan abad ke-20 yang kemudian mampu diruntuhkan oleh aksi protes massal secara politik melakukan kudeta sekaligus melakukan revolusi terhadap pemerintahan secara total menjadi Republik Mesir. Kemudian pergolakan hebat terjadi sehingga menjadi revolusi terbesar sepanjang sejarah Mesir hingga saat ini adalah Revolusi Mesir 2011 hingga meruntuhkan rezim otoriter berkuasa selama hampir 30 tahun lebih di Mesir. Pergolakan politik era modern Mesir terjadi tidak terlepas kembali peran dari militer dalam ikut serta dalam mengurus perpolitikan Mesir saat itu setelah rezim otoriter negaranya turun dari jabatan presiden. Bahkan militer juga berperan kembali dalam urusan konstitusi negara hingga pelaksanaan pemilu demokrasi pasca Revolusi 2011 dan

puncaknya kalangan militer berperan penting dalam kudeta pemerintahan pasca revolusi 2011 era Mursi. Dengan demikian, pergolakan politik Mesir tidak terlepas dari peran militer dalam arus demokrasi dan struktural pemerintahan yang selalu mengalami kesenjangan dan cenderung tidak mendapatkan finalisasi.

Demokrasi tidak terjadi di Mesir selama era modern, terutama sejak abad ke-20 hingga awal abad ke-21. Faktor otoriterisme rezim pemerintahan yang berkuasa selama bertahun-tahun dan melakukan modifikasi hukum untuk mempertahankan kekuasaannya serta melakukan tindakan persekusi hingga memasukkan ke jeruji besi para pemberontak pemerintahan tanpa proses pengadilan. Walaupun Mesir sudah menabalkan dirinya sebagai negara republik yang menganut sistem demokrasi berasaskan semi-sekuler, akan tetapi Islam tetap eksis sebagai landasan negara dan agama masyarakat, secara sederhana Islam di negara Mesir tidak dimarjinalisasikan secara sosial-kebudayaan, namun secara politik-ekonomi mengalami marjinalisasi.

Referensi

- Ahmad, D. (1974). *Ikhtisar Perkembangan Islam*. Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Amri, U. (2015). *Masa Depan Mesir Pasca Pemerintahan Hosni Mubarak* [Diploma, Universitas Hasanuddin]. <https://core.ac.uk/download/pdf/77621106.pdf>
- Atthahara, H. (2017). DEMOKRATISASI DI NEGARA MUSLIM: TRANSISI MENUJU DEMOKRASI PADA MASA REFORMASI 1998 DI INDONESIA DAN GEJOLAK REVOLUSI MESIR 2011. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 2(2), 155-155.

- <https://doi.org/10.35706/jpi.v2i2.974>
- Fuad, A. M. (2016). PERGOLAKAN POLITIK MESIR MASA KOLONIAL DAN DAMPAKNYA TERHADAP REFORMASI HUKUM KELUARGA ISLAM. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v1i2.695>
- Ghafur, M. F. (2016). AGAMA DAN DEMOKRASI: MUNCULNYA KEKUATAN POLITIK ISLAM DI TUNISIA, MESIR DAN LIBYA. *Jurnal Penelitian Politik*, 11(2), 16. <https://doi.org/10.14203/jpp.v11i2.203>
- Hitti, P. K. (2008). *History of The Arabs*. Serambi Ilmu Semesta.
- Ibrahim, Q. A., & Saleh, M. A. (2014). *Buku Pintar Sejarah Islam*. Zaman.
- Izaqi, M. S. (2016). *Pengaruh Kelompok Wahabi Terhadap Politik Luar Negeri Arab Saudi Dalam Arab Spring Di Mesir Tahun 2011-2013*. 5(2), 12.
- Juned, M., Maliki, M., & Asrudin, M. (2013). Kekuatan Politik Media Sosial: Uji Kasus pada Revolusi Mesir 2011. *Global: Jurnal Politik Internasional*, 15(1), Article 1. <https://doi.org/10.7454/global.v15i1.20>
- Lapidus, I. M. (1999). *Sejarah Sosial Umat Islam Bagian I & II* (A. Mas'adi, Trans.). RajaGrafindo Persada.
- Sahasrad, H. (2020). Pergolakan Mesir: Dari Revolusi ke Transisi Demokrasi. *Konfrontasi: Jurnal Kultural, Ekonomi Dan Perubahan Sosial*, 3, 42-55. <https://doi.org/10.33258/konfrontasi2.v3i2.62>
- Susmihara, & Rahmat. (2013). *Sejarah Islam Klasik*. Ombak.
- Svahida, K. R. (2017). *Peran Gerakan Kifaya dalam Perubahan Sistem Politik Mesir Masa Husni Mubarak (2003-2008)* [Diploma, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Fakultas Adab dan Humaniora, 2017]. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/36822>
- Trisnawati, D. (2016). REVOLUSI MESIR 23 JULI 1952: BERAKHIRNYA PEMERINTAHAN RAJA FAROUK. *ISTORIA: Jurnal Pendidikan dan Sejarah*, 12(1), Article 1. <https://doi.org/10.21831/istoria.v12i1.9543>
- Ulfa, A. M. (2017). *DINAMIKA GERAKAN POST-ISLAMISME DALAM POLITIK MESIR DAN TURKI: SEBUAH PERBANDINGAN* [Diploma, Universitas Jember]. <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/82300>
- Wibowo, T. (2021). Dinamika Sains dalam Islam pada Masa Keemasan: Kontribusi & Rekonstruksi dalam Perkembangan Keilmuan Kekinian. *Tsaqofah dan Tarikh: Jurnal Kebudayaan dan Sejarah Islam*, 6(1), 51-62. <https://doi.org/10.29300/tjksi.v6i1.4276>

Widyarsa, M. R. (2014). Rezim Militer dan Otoriter di Mesir, Suriah dan Libya. *JURNAL AL-AZHAR INDONESIA SERI PRANATA SOSIAL*, 1(4), 273–283.

Yani, M. T. (2007). Wacana Pemerintahan Demokris dan Dinamika Politik di Negeri-negeri Timur Tengah: Saudi Arabia, Yordania, Mesir, Iran, dan Turki. *Islamica: Jurnal Studi Keislaman*, 1(2), 121–134.
<https://doi.org/10.15642/islamica.2007.1.2.121-134>

Zulfikar, F. (2017). *Demokratisasi dan Politik Transisi di Indonesia dan Mesir: Studi Perbandingan Jatuhnya Pemerintahan Abdurrahman Wahid (1999-2001) Dan Muhammad Mursi (2012-2013)* [Diploma, UIN Syarif Hidayatullah].
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/41060>